

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PADA PERIODE KEPEMIMPINAN FRANCOIS HOLLANDE (2015-2016)**

Pada bab inilah, terdapat pembuktian mengenai jawaban dari rumusan masalah dengan hipotesis yang telah penulis sampaikan, yakni terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan fenomena islamophobia di negara Perancis pada era pemerintahan Francois Hollande tahun 2015-2016. Dimulai dengan menjabarkan faktor pada pemersepsi (masyarakat Perancis), faktor pada target (kelompok muslim), dan faktor pada situasi.

#### **A. Faktor pada Pemersepsi (Masyarakat Perancis)**

Menurut (Robbins, 2008), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah persepsi, baik negatif maupun positif. Faktor pertama yang akan penulis bahas yakni faktor pada *perceiver* atau pemersepsi, hadir ketika seseorang (pemersepsi) melihat target dan interpretasi tentang apa yang mereka lihat dipengaruhi oleh berbagai macam karakteristik pribadi, diantaranya sikap dan kepribadian, motif, pengalaman masa lalu, dan harapan. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai *perceiver* atau pelaku persepsi adalah masyarakat Perancis, dengan alasan mereka merupakan subjek utama penelitian yang nantinya akan memunculkan persepsi-persepsi negatif sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya angka islamophobia di Perancis pada tahun 2015 hingga 2016.

Karakteristik pribadi pertama yang mempengaruhi munculnya persepsi di kalangan masyarakat Perancis yakni sikap dan kepribadian. Dibandingkan negara Eropa yang lain, masyarakat Perancis memiliki keunikan, dimana pelestarian “nilai-nilai” Eropa lebih tampak dijaga. Rakyat Perancis dikenal tidak gampang meniru gaya hidup, masih ada kebanggaan tersendiri sebagai orang Perancis, cara pandang dan sikap hidupnya ini dijadikan panutan bagi negara-negara

lain di Eropa. Secara singkat, mereka masih ada kesepakatan untuk menjaga warisan budaya yang diilhami nilai Katholik Roma, sekalipun secara resmi mereka tidak mempraktekan ajarannya (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Sikap dan kepribadian masyarakat Perancis diatas membuat seseorang akan diterima menjadi warga negara dengan kondisi yang berbeda-beda menurut tempat dan waktunya, tetapi berkaitan erat dengan hasrat atau keinginan yang mengindikasikan perasaan untuk “menjadi orang Perancis”. Walaupun ideologi tentang kewarganegaraan Perancis telah bersifat negara sentris dan asimilasionis, tetapi tetap mencakup gagasan bahwa penduduk bukan keturunan Perancis (bukan *français de souche*) harus memperlihatkan indikasi ingin menjadi orang Perancis, yang dibuktikan dengan mereka harus memiliki kebiasaan berfikir dan berperilaku menurut cara orang-orang Perancis sebelum mereka dapat sepenuhnya diterima sebagai anggota penuh dalam masyarakat politik, yakni sebagai *cité* (Meij, 2003).

Oleh karena itu, tak jarang muncul perbedaan antara kelompok yang merepresentasikan diri sendiri sebagai “saya merasa Perancis” dengan penglihatan orang lain (masyarakat Perancis) yang melihat sebaliknya, “tidak terlihat sebagai orang Perancis”. Perbedaan inilah yang diduga menjadi sumber ketegangan dan memicu penolakan di antara masyarakat lokal. Oleh karena itu, minoritas termasuk kelompok Muslim sering dikatakan sebagai “*othering*” atau orang lain, yang mengacu pada proses pelabelan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti kepercayaan, warna kulit, bahasa, aksen, pembawaan diri, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi dasar atau indikator dari terjadinya rasisme dan diskriminasi di kalangan minoritas, terlebih komunitas Muslim (Simon, 2012).

Ketika kelompok Muslim semakin meningkat jumlahnya, mulai muncul perdebatan yang panjang tentang mampu tidaknya komunitas Muslim untuk berperilaku yang sama menurut sikap dan cara hidup orang Perancis. Pernyataan

ini muncul, terutama karena tidak sedikit pemikir Barat (termasuk dari Perancis) berpendapat bahwa Islam secara intrinsik memang tidak selaras dengan demokrasi, HAM, persamaan gender, kebebasan berekspresi yang juga berakar dari nilai-nilai sekularisme dan demokrasi. Selanjutnya, bahwa di lingkungan muslim dikenal dengan apa yang disebut sebagai nilai-nilai *Ummah* dan *Pan Islamisme* yang mengindikasikan bahwa komunitas Muslim tidak bisa terpisahkan, sekaligus menjadi sesuatu hal yang dianggap tidak cocok dengan ide modern negara Barat yang berpijak pada nasionalisme (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Sebuah model Muslim yang “ideal” bagi Perancis adalah mereka yang berbicara bahasa Perancis, tunduk pada aturan negara, menghormati Konstitusi 1905 yang menegaskan sekularisme, Muslim yang datang ke Masjid yang dikelola para imam yang memperoleh pelatihan di Perancis, dan menghindari persoalan kebencian dalam setiap dakwahnya (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008). Pengertian “ideal” diciptakan oleh konstruksi masyarakat Perancis sendiri, sesuai dengan apa yang mereka yakini, sehingga hal diatas menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat Perancis untuk memandang kelompok Muslim harus berperilaku seperti apa, yang ideal harus sesuai dengan interpretasinya yang terkadang tidak sejalan dengan kenyataan yang ada.

Dicontohkan, mengenai konsepsi muslim yang “ideal” harus tunduk pada aturan negara dan menghormati konstitusi 1905 yang menegaskan sekularisme tetapi faktanya memang sejak dahulu sudah terjadi gesekan diantara keduanya. Insiden pada 22 Oktober tahun 1989, ketika ribuan Muslim menggelar demonstrasi di Paris untuk mendukung gadis-gadis Muslim yang dikeluarkan dari sekolah mereka (Sekolah Menengah Gabriel-Havez di Criel) karena mengenakan “penutup kepala”. Para demonstran memprotes keputusan Francois Bayrou selaku Menteri Pendidikan Perancis yang telah memperkenalkan peraturan yang melarang pemakaian

“lambang keagamaan yang mencolok” di sekolah-sekolah Perancis (Seljuq, 1997).

Selanjutnya, yang lain dari penafsiran muslim yang “ideal” diatas yakni muslim yang pergi ke Masjid yang dikelola oleh imam yang mendapat pelatihan dari pemerintah dan dilarang untuk menebarkan kebencian, tetapi faktanya banyak kasus yang mengangkut para Imam di Perancis, pada tahun 2015 dikutip dalam sebuah media online (*Radio France Internationale*), menurut Bernard Cazeneuve selaku Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah sudah mendeportasi 40 pengkhotbah yang sering menubar kebencian sejak tahun 2012, “*sejak awal tahun, kami telah memeriksa 22 kasus dan sekitar 10 imam dan pengkhotbah dengan unsur kebencian telah kami deportasi*” (Radio France Internationale, 2015).

Masuk kepada yang mengangkut tempat ibadah atau masjid, menurut *France 24* dari 2.500 Masjid dan ruang sholat yang terdapat di Perancis, sekitar 120 diantaranya telah dicurigai oleh otoritas Perancis berindikasi salafisme radikal. “*Tidak ada tempat di Perancis untuk mereka yang menyeru dan menghasut pada kebencian di aula atau Masjid. Sekitar 20 Masjid telah ditutup, dan akan ada yang lain,*” kata Cazeneuve. Fakta selanjutnya dikekumakan oleh sebuah laporan Komite Senat yang diterbitkan bulan Juli tahun 2015, ditemukan bahwa Masjid-Masjid di Perancis tidak hanya dibiayai oleh kantong pribadi, tetapi juga mendapat sumbangan dari luar negeri, khususnya Maroko, Aljazair, dan Arab Saudi, yang sebenarnya menurut laporan yang sama, dicantumkan secara resmi adanya pelarangan pembiayaan luar negeri terhadap Masjid (Serhan, 2016).

Munculnya banyak imam dan tempat ibadah yang ditutup di Negara Perancis, menandakan bahwa memang cukup banyak Muslim yang secara kebetulan atau tidak sengaja melakukan ibadah atau mendengarkan khotbah di Masjid atau ruang doa yang berindikasi radikal, sehingga dampaknya memunculkan konsepsi tidak “ideal” di antara masyarakat

Perancis. Selain itu, fakta-fakta sebelumnya juga menunjukkan bahwa memang apa yang pemersepsi anggap sebagai sesuatu yang ideal belum sepenuhnya bisa diwujudkan masyarakat muslim sesuai dengan interpretasinya. Disinilah pergesekan muncul ketika harapan tidak sesuai dengan realita yang ada.

Masuk kepada karakteristik selanjutnya yakni pengalaman masa lalu yang membuat seseorang memiliki gambaran secara nyata mengenai terbentuknya sebuah persepsi. Secara historis, pada abad ke 18 dan ke 19 negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mengumpulkan negara koloni, termasuk juga Perancis. Perancis memiliki banyak negara koloni yang tersebar hingga pada Benua Asia dan Afrika. Kolonialisasi mengarah pada negara-negara Timur, sehingga secara tidak langsung menyebabkan implikasi nyata terhadap munculnya perspektif Barat pada Timur (non Barat), atau Barat melakukan penguasaan pada wilayah Timur. Dalam hal ini, Islam juga termasuk kedalam bagian dari Timur, mengingat Perancis lama menguasai negara dengan mayoritas Muslim, seperti di semenanjung Afrika (Ismoyo, 2016).

Munculnya konotasi “Barat menguasai Timur” pada era kolonialisasi, secara tidak langsung membangkitkan adanya identitas superioritas negara Eropa yang dinilai sangat kuat dan hebat, sedangkan wilayah timur (termasuk didalamnya muslim) adalah primitif, *uncivilized*, barbar, tidak rasional, dan memiliki nilai-nilai yang sangat bertolak belakang negara Eropa. Ini berkaitan secara langsung dengan karakteristik pribadi pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sikap dan kepribadian masyarakat Perancis yang mengenal istilah “*othering*” atau orang lain, dimana budaya Timur tidak memiliki kesamaan dengan nilai budaya Barat. Superioritas Eropa, terkhusus Perancis pada kenyataannya belum bisa sepenuhnya hilang dari setiap masyarakatnya, hal ini menyebabkan mereka sulit untuk menerima adanya perbedaan, berujung kepada tindakan rasis dan diskriminatif kepada “yang bukan Barat” (Ismoyo, 2016). Hal ini dapat dikaitkan dengan maraknya fenomena islamophobia yang berangkat dari

terjadinya diskriminasi kecil, lalu meluas menjadi xenophobia hingga sampai secara spesifik mengarah pada islamophobia.

Selanjutnya, pengalaman masa lalu yang cukup signifikan menjadi faktor pendorong terciptanya persepsi pada masyarakat Perancis yakni terjadinya tragedi paling menggemarkan, yang membuat Islam menjadi sorotan dunia internasional karena peristiwa “*World Trade Center 11 September 2001*” atau lebih sering disebut dengan peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut sangat bersejarah, mengingat semua perhatian tertuju kepadanya, terlebih lagi dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Gedung kembar WTC hancur yang diduga disebabkan oleh serangan teroris yang dipercaya adalah kelompok militan Islam *Al-Qaeda*. Fokus politik luar negeri beberapa negara turut berubah sejak tragedi tersebut, *tagline* “*War on Terror*” yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat dimuat dalam banyak kanal media massa baik cetak maupun online diseluruh penjuru dunia. Kehebohan dan kesuksesan politik “*war on terror*” tentu menjadi kiblat bagi banyak negara di dunia untuk turut menjaga keamanan negaranya dari serangkaian teror yang membahayakan.

Dampak peristiwa tersebut juga nyatanya sangat berpengaruh di Perancis. Undang-Undang tahun 2004 tentang pelarangan pemakaian atribut-atribut keagamaan yang mencolok di sekolah negeri, menurut Gilles Garachon selaku Konsul Kebudayaan Perancis di Indonesia mengakui bahwa gagasan untuk melahirkan peraturan baru itu memang muncul sebagai akibat dari serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, walaupun dengan dalih dimaksudkan untuk tidak mendiskriminasi salah satu golongan agama, tetapi justru untuk mendukung toleransi dan sesuai dengan asas *laïcité*.

Tragedi WTC dan isu terorisme dalam konteksnya bukan sekedar berimplikasi pada terbitnya Undang-Undang tersebut, tetapi lebih dari itu. Pada saat itu, salah satu imam bernama Abdul kader Bouzianne dan Abdelhamid Aissaoui dipulangkan ke negaranya, Aljazair dengan alasan tidak

memiliki *titre de sejour* (ijin tinggal) dan dianggap memiliki visi radikal. Sentimen mulai menguat seiring dengan berjalannya waktu, Perancis mengidentifikasi dari 1.600 Masjid di Perancis 20 diantaranya diperkirakan sebagai tempat dimana para imam radikal untuk berkhotbah. Dalam konteks ini, terlihat bahwa Perancis mulai memiliki sentimen yang kuat mengenai peristiwa terorisme dan radikalisme (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Faktor pada pemersepsi selanjutnya dipengaruhi oleh karakteristik motif dan harapan. Munculnya sekularisme (*laïcité*). Perancis berkat perjalanan panjang negara menghadapi polemik antara kehidupan bernegara dan campur tangan Katolik Roma didalamnya. Sampai pada tahun 1905, terjadi pemisahan diantara keduanya dengan diterbitkannya sebuah Undang-Undang. Mulai dari peristiwa tersebut, agama tidak lagi dapat memainkan perannya dalam kehidupan politik bernegara, termasuk juga penggunaan simbol-simbolnya yang “mewah” di ruang publik. Dokumen resmi berbentuk UU tersebut menjadi titik balik negara dalam merespon segala tindakan yang dimaknai sebagai pelanggaran dan penggunaan atribut-atribut keagamaan tertentu. Perancis memiliki pemikiran bahwa, sekularisme menjadi bukti netralitas negara terhadap seluruh kepercayaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya kelompok Muslim yang ada di Perancis membawa kondisi negara dan suasana yang semakin beragam. Perancis pada dasarnya merupakan negara Republik sekuler yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi seluruh warga negara dihadapan hukum, dengan mengadopsi nilai-nilai Republik yakni *liberté*, *legalité*, dan *fraternité*. Tumbuhnya kelompok Muslim menjadi satu kesatuan yang mulai mendominasi negara menjadi ancaman tersendiri terhadap sekularisme (*laïcité*) Perancis. Saat ini, Muslim menjadi kelompok terbesar kedua yang mendiami Perancis, berangkat dari latar belakang sejarah yang kuat, mereka turut hadir dan mewarnai Perancis dengan beraneka ragam kultur dari masing-masing negara asal.

Maka dari itu, tentunya terdapat motif dan harapan untuk terus mempertahankan paham atau nilai-nilai Perancis terdahulu, yang masih melekat hingga sekarang. Sekularisme (*laïcité*) Perancis merupakan hal fundamentalis yang tidak dapat ditentang dan digantikan oleh apapun. *Laïcité* adalah faktor historis yang mengungkapkan identitas Perancis dan sekaligus juga meletakkan aturan dasar tentang bagaimana masyarakat Perancis berjalan, bagaimana sistem politik diatur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dari pandangan masyarakat Perancis, dapat diasumsikan bahwa kelompok Muslim di Perancis harus merangkul *laïcité* ketika ingin mengembangkan dan memproyeksikan identitasnya di Perancis (Waters, 2016).

Persoalan muncul ketika ternyata karakteristik-karakteristik pribadi yang memicu munculnya faktor pada target yang telah disebutkan diatas, sulit untuk diseragamkan dengan kaum Muslim kedalam sikap *mainstream* Perancis. Di Perancis, *laïcité* mewakili kebebasan beragama dan mempraktekan agama dalam ruang privasi tersendiri. Tetapi disisi lain, untuk mempraktikan diri sebagai seorang Muslim atau individu dengan budaya dan tradisi Islam, *laïcité* bisa dimaknai sebagai penindasan karena mencegah komunitas Muslim untuk memproyeksikan atau menampilkan praktek kepehutan mereka terhadap agama di ruang publik (*hijab*). Masalah utama yang dihadapi di Perancis adalah bahwa terdapat dua budaya dan nilai yang sangat berbeda, berusaha untuk hidup bersama, tetapi dalam penerapannya mencakup aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari (Waters, 2016). Dalam artian, terjadi banyak perbedaan dengan mereka, karena nilai yang dianut komunitas Muslim dengan segala nilainya banyak yang bertolak belakang dari kultur lokal.

## **B. Faktor pada Target (Masyarakat Muslim)**

Setelah peneliti memaparkan secara rinci faktor pada pemersepsi, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor pada target (masyarakat Muslim) yang akan

mempengaruhi munculnya suatu persepsi. Seperti yang sudah dijelaskan secara detail pada BAB II, kelompok muslim berasal dari latar belakang yang cukup beragam, mayoritas datang dari negara-negara bekas koloni Perancis yang ditarik sebagai pekerja industri pasca hancurnya Perancis akibat perang berkepanjangan. Banyak yang datang dengan motif ekonomi yang kuat, sebelum memutuskan untuk tinggal menetap di Perancis dengan berlabel imigran yang tentu dianggap menyebabkan munculnya kesenjangan dengan masyarakat lokal.

Islam umumnya dianggap sebagai komunitas terbesar kedua di Perancis setelah Kristen. Kenyataan demografis ini tentu tidak mudah diterima bagi sebagian warga Perancis. Kesan beredar luas dimasyarakat yang mungkin tidak dapat dibendung lagi. Kedekatan dengan kelompok radikal, memiliki nilai yang melenceng dari Republik Perancis, dan lain sebagainya menjadi anggapan yang tidak akan pernah hilang dari citra kelompok Muslim. Terlalu seringnya diskusi tentang Islam di Perancis mengacu pada munculnya anggapan bahwa Muslim menjelma sebagai sebuah masalah sosial. Terlalu sering pertanyaan diajukan, “Bisakah Muslim masuk ke dalam masyarakat Perancis?”.

Pertanyaan tersebut bisa dijelaskan dengan munculnya sebuah usaha dari Pemerintah Perancis melalui Kementerian Dalam Negeri mengenai sebuah kebijakan integrasi yang dirancang untuk melayani pendatang baru (menetap di Perancis minimal lima tahun). Kebijakan ini didirikan dibawah *Direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté* (DAIC) (Escafré-Dublet, 2014). Model integrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Perancis yakni *Modèle républicain d'intégration*, dengan cara mengasimilasi budaya asing secara individual ke dalam nilai-nilai republikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tubuh negara Perancis diharapkan dapat tertanam pada setiap warganya. Namun yang menjadi permasalahan yakni model integrasi yang diterapkan tidak dibagi menurut perbedaan identitas antar individual atau kelompok, tetapi di

satukan melalui satu aspek yang paling dianggap penting, biasanya melalui pendidikan di sekolah-sekolah, keikutsertaan di organisasi baik politik atau non-politik, komunitas, atau lain sebagainya (Miranda, 2007).

Dengan demikian, intergrasi yang diterapkan tidak secara fokus pada masing-masing kelompok. Negara bersifat pasif, karena hanya menunggu mereka berintegrasi untuk mencapainya. Hasil dari integrasi tersebut, Perancis juga yang menentukan kadar keberhasilan atau kegagalan dari proses tersebut. Walaupun pasif, namun terlihat dominasi dalam peristiwa tersebut. Seorang imigran atau keturunannya dapat merasa dan mengatakan bahwa mereka sudah berhasil berintegrasi dengan nilai-nilai Perancis, tetapi hanya penduduk asli yang dapat menilai berhasil atau tidaknya sebuah integrasi. Kondisi inilah yang sering membuat kelompok Muslim merasa terombang-ambing (Miranda, 2007).

Bukan hanya itu saja, mereka datang dalam jumlah yang cukup signifikan dari berbagai negara Muslim seperti Turki dan Senegal, tetapi mayoritas datang dari Afrika Utara. Walaupun orang-orang Afrika Utara tidak terlalu berbeda secara budaya dari beberapa rekan negara yang lain, tetapi hal tersebut merupakan salah satu dari tantangan terbesar bagi tradisi integrasi dan asimilasi Perancis. Kesulitan muncul berasal dari ingatan permasalahan Perancis tentang kolonialisme di Afrika Utara, dimana pada periode itu Muslim tidak dianggap sebagai warga negara sebelum meninggalkan Hukum Islam (Cesari, 2002). Tidak heran jika orang-orang Afrika Utara sangat lambat dan sulit untuk mengakui tanah atau negara bekas penindas mereka. Selanjutnya dalam banyak kasus, mereka menunda untuk melaksanakan reunifikasi keluarga di tanah Perancis dan beberapa juga enggan memperoleh kewarganegaraan dengan alasan. Hal tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan bangsa mereka sebelumnya terhadap kolonialisme.

Kelompok Muslim tersebut juga dikenal sangat taat dalam menjalankan perintah-perintah Islam, diantaranya menuntut perbedaan antara haram dan halal baik dalam aturan makanan, pemisahan antara pria dan wanita di ruang publik atau pendirian Masjid. Maka dari itu, hal-hal tersebut bisa menjadi tantangan selanjutnya bagi masyarakat Muslim untuk membaaur, karena peristiwa tersebut menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, terdapat fragmentasi diantara garis etnis masing-masing kelompok yang menghalangi minoritas Muslim untuk menjadi kesatuan yang koheren di Perancis. Masjid-masjid yang seharusnya menjadi situs sakral lambang penyatuan agama, namun berfungsi sama seperti pusat-pusat yang berorientasi kepada etnis tertentu, dengan memberikan bantuan sosial dan keuangan, pendidikan untuk anak-anak di negara asalnya. Akibatnya, Masjid terpisah berdiri di lingkungan yang berbeda, contohnya untuk Arfika Utara dan Turki, walau tidak ada perbedaan ritual keagamaan (Cesari, 2002).

Selain hambatan yang disebutkan diatas, terdapat pula poin-poin yang dirasa membuat masyarakat Muslim merasa sulit untuk melakukan proses integrasi, diantaranya yakni adanya gap sosial dan ekonomi. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai kondisi sosial dan ekonomi para imigran dengan mengklasifikasikannya kedalam beberapa poin, diantaranya:

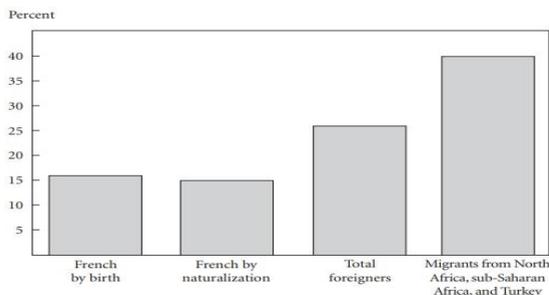
### **1. Masalah pengangguran**

Seperti kebanyakan imigran di negara-negara industri lainnya, kaum Muslim yang datang ke Perancis selama paruh kedua abad kedua puluh mengalami kesulitan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Mereka selalu ditempatkan pada pekerjaan tingkat rendah, terutama di sektor industri ketika tiba tahun 1960-an hingga 1970-an. Restrukturisasi dan PHK yang dilakukan selama tahun 1970-an hingga 1980-an semakin memperparah dan jelas membawa dampak yang tidak proporsional pada Muslim Perancis. Banyak

diantaranya menganggur, pensiun dini, dan tidak dapat bekerja akibat sakit atau cacat tetap akibat tingginya kecelakaan kerja (Tebbakh, 2007). Masalah-masalah tersebut diperkuat oleh situasi ekonomi di Perancis, terutama pasar tenaga kerja yang berhenti dan gagal pulih pada 1990-an, sementara tindakan rasisme terus membebani mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengangguran merupakan salah satu dari sekian hambatan terbesar dalam proses integrasi. Ketika masyarakat Muslim menganggur, mereka akan sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja nasional, yang dimana proses interaksi paling signifikan hadir. Pada bab sebelumnya sudah disinggung sedikit mengenai tingkat pengangguran populasi asli imigran umumnya dua kali lipat dari populasi keseluruhan, angka paling tinggi disumbang oleh pemuda dari Afrika Utara (Laurence & Vaisse, 2006). Pada (Figure 4.1) dapat dilihat mengenai prosentase pengangguran pada usia 15 hingga 29 tahun yang tersebar di Perancis, mulai dari warga lokal hingga pendatang. Prosentase pengangguran terbesar masih disumbang oleh imigran dari Sub-Saharan Afrika dengan hampir 40 %, dan yang terendah yakni 13 % oleh warga lokal yang lahir di Perancis.

**Figure 4. 1 Prosentase Pengangguran pada Usia 15 hingga 29 tahun dari Negara Asal**



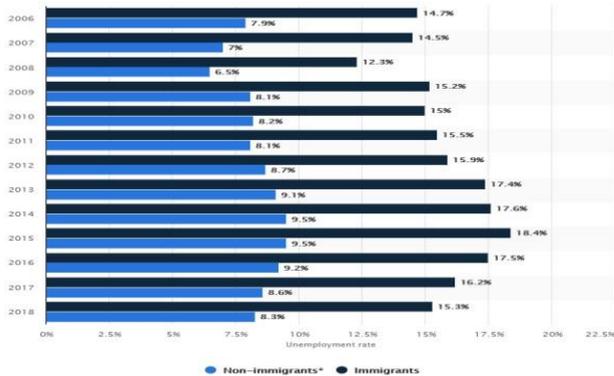
Sumber: (Laurence & Vaisse, 2006)

Sebagian dari perbedaan dalam tingkat pengangguran disebabkan karena perbedaan dalam skala keterampilan, karena pekerjaan dengan keterampilan rendah adalah yang paling terpengaruh oleh ekonomi yang lemah.

Selain itu, pengangguran juga dapat diakibatkan karena maraknya diskriminasi dalam dunia pekerjaan, seperti dicontohkan yang sering terjadi pada biro pencari kerja nasional di kota Alsace, ditemukan dua buah iklan lowongan pekerjaan yang berbau rasisme, “Dicari pegawai untuk ditempatkan pada layanan kebersiham dengan profil sebagai berikut: ras kulit putih, berpenampilan menarik, dinamis, pekerja keras, tekun dan penuh inisiatif. Kontrak kerja tetap. Pengalaman kerja tidak diutamakan” (Miranda, 2007). Walaupun tidak semua bertindak secara diskriminatif, tetapi ditemukannya hal-hal seperti itu secara tidak langsung menjadi hambatan serta sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan integrasi muslim di Perancis dalam sektor dunia kerja.

Menurut (Statista Research Department, 2019), sejak krisis keuangan yang melanda negara pada tahun 2008, Perancis telah berjuang dengan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran mencapai rekor pada 2015, dengan 10,36 % mencakup seluruh warga negara hingga pendatang. Angka ini akan secara rinci dijabarkan dalam (Figure 4.2). Dalam prosentase dibawah ini, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2006 hingga 2018, angka pengangguran tertinggi ditunjukkan pada tahun 2015 dengan 18,4 %, dan yang lebih mengawatirkan yakni angka tersebut disumbangkan oleh para imigran. Meskipun Perancis telah melihat peningkatan tingkat pengangguran sejak lama, tetapi ini menjadi salah satu tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi.

**Figure 4. 2 Prosentase Orang yang Mencari Pekerjaan di Perancis tahun 2006-2018 Berdasarkan Status Imigrasi**



Sumber: (Statista Research Department, 2019)

## 2. Masalah Perumahan dan Fenomena *Ghetto*

Imigran yang datang dan keturunan mereka cenderung berkonsentrasi pada proyek perumahan publik yang dibangun pada 1960-an hingga 1970-an di lingkungan yang berlokasi di pinggir-pinggir kota, dikenal dengan sebutan *banlieue* atau *cit *. Berkisar 6 juta orang tinggal di daerah-daerah ini, mencakup sekaligus populasi lokal non-imigran Perancis yang merasa daerah ini sesuai dengan pendapatannya (Laurence & Vaisse, 2006). Fenomena *ghetto* lebih mengacu pada terkonsentrasinya individu yang di *banlieue*, dengan lingkungan yang ditandai oleh kemiskinan, ketergantungan, pasar gelap, dan lain sebagainya. Fenomena ini menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan bagi komunitas imigran khususnya Muslim yang berdampak pada memisahkan dan munculnya gap dalam kehidupan sosial.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *Renseignements Généraux* (RG), terdapat agen kepolisian yang memantau kelompok-kelompok radikal di Perancis, dan hasilnya bahwa setengah dari lingkungan yang dianggap “sensitif” yang mereka pelajari mencakup keberadaan populasi Muslim didalamnya yang menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan bagi kehidupan sosial dan politik nasional. Daerah-daerah ini adalah rumah bagi sebagian besar keluarga yang berasal dari imigran. Menurutny, mereka telah mengembangkan jaringan bisnis, menunjukkan bukti kecenderungan “anti-Barat” yang tinggi dan memakai pakaian non-Barat dan religus yang tentunya berbeda dari lingkungan lainnya.

Buku yang diterbitkan oleh *Open Society Foundations* pada tahun 2012 mengungkapkan sebuah survei pendapat yang diikuti oleh masyarakat Muslim yang tinggal di Perancis, baik yang lahir di Perancis, maupun datang dari luar Negara Perancis. Dalam bukunya, penulis mengajukan pertanyaan “*Do you see yourself as French?*” atau “Apakah anda melihat diri anda sebagai orang Perancis?”, dan hasil dari pertanyaan diatas dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 4.1 “Do you see yourself as French?”**

		<b>Muslim yang lahir di Perancis %</b>	<b>Muslim yang lahir di luar Perancis %</b>
Ya		85,7	29,1
Tidak		14,3	70,9
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Nomer</b>	<b>21</b>	<b>79</b>

Sumber: (Open Society Fondations, 2012)

Umat Muslim yang lahir di Perancis cenderung menganggap diri mereka orang Perancis, dibandingkan dengan Muslim yang lahir di luar Perancis. Jika banyak fakta dan anggapan mengatakan lahir di Perancis selalu berkaitan dengan perasaan yang dipersepsikan sebagai orang Perancis, umat Islam jarang mendapatkan manfaat dari pengakuan ini, bahkan ketika mereka dilahirkan di Perancis. Pengalaman diskriminasi ditunjukkan ketika responden Muslim diminta untuk menjelaskan mengapa mereka tidak menganggap dirinya sebagai orang Perancis:

*“I don’t think it is a secret that a lot of French are racist. Discrimination bothers me. So I cannot feel myself as fully belonging to Paris and neither to France.”*

*“Put a French person and an Arab together and you’ll find the following: the French person is the boss and the Arab is the worker. I don’t want to be considered French because it would mean hypocrisy.”*

*“I have been in France for 20 years and when I applied for naturalisation, they asked for a lot of documents. We cannot be considered French if the state itself does not have consideration for us.”* (Open Society Foundations, 2012)

Disamping itu, mereka juga memiliki keinginan untuk menghargai identitas nasional asli mereka:

*“I can’t feel I belong to a country that discriminates against me. I love this neighbourhood and this city, but I don’t have any feelings for this country.”*

*“I am not French. Even if one day I get the documents, I cannot become white. I remain African.”* (Open Society Foundations, 2012)

Bisa disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa sejauh ini masyarakat Muslim masih memiliki kesulitan untuk menyatukan dirinya kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang yang berasal dari dalam masing-masing individu maupun dari luar. Akibatnya, faktor pada target (masyarakat muslim) inilah yang nantinya akan menimbulkan persepsi bagi peningkatan fenomena islamophobia di Perancis pada Era Presiden Hollande.

### **C. Faktor pada Situasi**

Menurut penulis, faktor inilah yang paling berpengaruh bagi munculnya sebuah persepsi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan fenomena islamophobia di Perancis pada tahun 2015-2016. Walaupun pada masa tersebut Presiden Hollande sedang genjarnya membicarakan perdamaian dan kesatuan dalam forum-forum internasional, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor dalam negeri dan luar negeri yang tidak bisa dikontrol oleh Pemerintah, mengambil perannya. Pada tahun tersebut gejala memang sedang terjadi, peristiwa Charlie Hebdo, Paris 13 November, krisis pengungsi Eropa, dan gejala islamophobia di beberapa negara di dunia. Peristiwa tersebut akan diuraikan secara rinci dibawah ini.

#### **1. Peristiwa Charlie Hebdo**

Serangan ini terjadi pada 7 Januari tahun 2015, diawali dengan dua orang tidak dikenal memasuki kantor jurnalis Charlie Hebdo di Paris pukul 11:30 pagi. Ledakan terjadi hingga menewaskan 12 korban termasuk kartunis, jurnalis, dan editor. Beberapa hari kemudian, peristiwa diikuti penembakan di pinggiran selatan Paris dan penyanderaan di supermarket halal *Hyper Cacher*, empat orang sandera tewas. Peristiwa

ini terjadi sekitar sepuluh tahun setelah publikasi pertama “Kartun Nabi Muhammad” (Callamard, 2015). Kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo dianggap ofensif oleh para pengikut Islam. Pada Desember 2012, komunitas Muslim Perancis juga menggugat Charlie Hebdo atas publikasi gambar yang sama. Memang kantor majalah tersebut kemudian menerima banyak ancaman dari Muslim radikal yang menyebabkan banyak polisi Perancis mengalokasikan petugas keamanan untuk melindungi jurnalis majalah dan hak mereka untuk memiliki kebebasan berekspresi (Połońska-Kimunguyi & Gillespie, 2016).

Peristiwa ini membawa rasa tidak aman warga Perancis secara keseluruhan. Dalam beberapa jam setelah serangan tersebut. Slogan “*Je suis Charlie*” menjadi trending di Twitter. Pada puncaknya, tagar “*#JeSuisCharlie*” dikirim dengan kecepatan 6.500 kali per-menit dan dalam prosesnya menjadi salah satu yang paling populer (Moran, 2017). Selain itu, diikuti oleh gerakan solidaritas besar yang spontan di seluruh wilayah Perancis. Di Paris, demonstrasi terbesar dalam sejarah baru-baru ini terjadi di *Place de la République* pada 11 Januari 2015. Selain itu, jutaan warga Perancis di kota-kota lainnya seperti di Bordeaux, Lyon, dan Rennes juga menunjukkan solidaritasnya bagi ketakutan dan kesedihan korban dan keluarganya akibat serangan teroris dengan menyatakan slogan “*Je suis Charlie*”. Lebih jauh, mereka juga menyatakan persatuan untuk melawan terorisme dan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai demokrasi berdasarkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (Pelletier & Drozda-Senkowska, 2016). Peristiwa ini berimplikasi pada meningkatnya persepsi pada ancaman terorisme yang kuat. Warga perancis menganggap peristiwa tersebut mengancam negara dan nilai-nilainya, daripada ancaman terhadap individu. Jajak pendapat yang dilakukan Oxada pada 11 Januari

2015 yang diambil di Perancis setelah serangan Perancis Charlie Hebdo mengungkapkan bahwa warga Perancis melaporkan perasaan kemarahan (61%), kesedihan (49%), solidaritas (46%) dan ketakutan (17%) (Pelletier & Drozda-Senkowska, 2016).

## 2. Serangan 13 November 2015

Pada hari Jumat, 13 November 2015, kurang lebih tujuh serangan teroris serentak terjadi di Paris. Menurut berbagai sumber, korban tewas mencapai 129 orang termasuk di antaranya 89 di gedung konser Bataclan, dan sebanyak 350 orang mengalami luka-luka. Setidaknya tujuh teroris terlibat dalam serangan terorganisir ini, termasuk penembakan masal, penyanderaan, dan serangan bunuh diri. Tiga tersangka meledakkan dirinya menggunakan sabuk bom di sekitar stadion sepak bola nasional (*Stade de France*), empat yang lain di sebuah restoran Boulevard Voltaire dan Gedung konser Bataclan (International Institute for Counter-Terrorism, 2015). Peristiwa hanya berselang sembilan bulan pasca serangan sebelumnya, yakni tragedi Charlie Hebdo dan peristiwa kali ini memiliki skala dan dampak yang lebih besar pula bagi Perancis secara keseluruhan.

**Gambar 4.1 Peta Lokasi Serangan 13 November 2015 di Paris**



Sumber: (BBC News, 2015)

Peristiwa pertama terjadi di Stadion Nasional Perancis (*Stade de France*) pada pukul 21:20, diawali dengan terjadinya ledakan di luar stadion, dimana ribuan penggemar menyaksikan tim nasional Perancis bermain melawan Jerman dalam pertandingan sepak bola. Seorang pria awalnya dicegah pihak keamanan untuk memasuki stadion pada Gerbang D karena sudah dianggap mencurigakan. Lalu pria itu mundur dari penjaga keamanan dan meledakkan dirinya dengan sabuk bom di perutnya. Pria kedua meledakkan dirinya di luar Gerbang H. Presiden Hollande yang kebetulan berada di dalam stadion untuk menonton pertandingan segera dilarikan ketempat yang aman. Selanjutnya, bom bunuh diri ketiga meledak di sebuah toko makanan cepat saji dekat stadion.

Ditempat lain pada pukul 21:25, sebuah lingkungan yang dikenal ramai dengan sejumlah bar, restoran, dan kafe tiba-tiba didatangi oleh orang-orang bersenjata dengan kendaraan hitam sambil melepaskan tembakan ke arah *Le Carillon* dan *Le Petit Cambodge*, korban tewas mencapai 15 orang, dan 15 lainnya menderita luka-luka. Para tersangka terus melanjutkan perjalanannya ke arah *Rue de la Fontaine au Roi* dan menembaki dua restoran lagi (*Café Bonne Biere* dan *La Casa Nostra*), 5 orang tewas dan 8 lainnya luka parah. Perjalanan masih terus dilakukan, para saksi mata mengungkapkan, orang-orang bersenjata terus melepaskan tembakan ke arah bar (*La Belle Equipe*), 19 orang tewas ditambah 9 lainnya luka parah. Pukul 21:40, seorang tersangka memasuki restoran *Le Comptoir Voltair*, lalu duduk, memesan, dan tanpa diduga meledakkan dirinya menggunakan rompi bom yang melukai 15 orang di tempat tersebut (Williams, 2016).

Peristiwa belum berakhir, serangan selanjutnya terjadi di gedung konser Bataclan dengan 1.500 kursi,

dimana grup rock Amerika *Eagles of Death Metal* bermain, dengan tiket terjual habis. Pada pukul 21:40, tiga pria serba hitam memasuki gedung dengan membunuh penjaga keamanan dan mulai menembaki kerumunan. Korban mencapai 90 orang, dan banyak yang ikut tersandra. Pengepungan lebih dari dua jam hingga polisi mengepung gedung tersebut. Seorang petugas polisi berhasil menembak salah satu pria, namun sabuk bomnya meledak, sementara pria yang lain juga meledakkan dirinya. Sebanyak 99 orang terluka dan dibawa kerumah sakit.

Keadaan Perancis semakin tidak terkendali. Menanggapi serangan itu, Presiden Francois Hollande mengumumkan keadaan darurat pada 14 November 2015. Negara Perancis berada dalam siaga satu, perbatasan Perancis ditutup. Dalam kondisi darurat, pasukan keamanan dan polisi mulai untuk menggeledah rumah dan tempat-tempat yang diduga aktor dari serangan keji tersebut tanpa ijin dari pengadilan. Hasilnya yakni 168 rumah telah di geledah paksa dan 104 orang yang terkait dengan jaringan radikal ditetapkan di bawah tahanan rumah (Williams, 2016).

### **3. Krisis Pengungsi di Eropa**

Memasuki musim panas tahun 2015, Eropa menandai titik balik dalam sejarah migrasi Uni Eropa. Foto-foto ribuan pengungsi yang tiba setiap harinya di pulau-pulau Yunani melalui jalur laut terus diabadikan, perjalanan mereka terus berlanjut melalui “rute Balkan” untuk sampai ke Eropa Tengah mendominasi berita-berita utama pada surat kabar dan media elektronik di semua negara anggota Uni Eropa (Vanhercke, Natali, & Bouget, 2016). Terjadi peningkatan 500 % pada total kedatangan mereka ke Eropa (Global Shelter Cluster, 2016). Menurut laporan

yang diterbitkan oleh *Pew Research Center*, sebuah rekor terpecahkan melalui 1,3 juta imigran mengajukan suaka di 28 negara anggota Uni Eropa, Norwegia dan Swiss pada tahun 2015 (Connor, 2016). Sekitar setengah dari yang mendaftar berasal dari Suriah, Afganistan dan Irak, separuh lainnya dari negara-negara seperti Pakistan, Afrika Utara maupun Tengah dan Balkan (Vanhercke, Natali, & Bouget, 2016). Konflik, menjadi salah satu alasan yang paling populer sebagai akibat dari banyak dari mereka memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya untuk mencari perlindungan di negara tetangga.

**Tabel 4.2 Jumlah Imigran yang Datang ke Eropa pada tahun 2015-2016**

<b>Negara Kedatangan di Eropa</b>	<b>Jumlah orang yang datang</b> (1 Jan 2015 – 31 Des 2016)	<b>Jumlah orang yang terdampar</b> (Per 31 Des 2016)
Italia	335.278	<i>Tidak tersedia</i>
Yunani	1.034.269	62.784
Bulgaria	47.136	5.560
Spanyol	17.091	<i>Tidak tersedia</i>
<b>Negara Transit di Eropa</b>	<b>Jumlah orang yang datang</b> (1 Jan 2015 – 31 Des 2016)	<b>Jumlah orang yang terdampar</b> (Per 31 Des 2016)
Makedonia Utara	478.004	137
Serbia	678.493	5.633
Hungaria	430.690	460

Croasia	659.105	624
Slovenia	477.791	315

Sumber: (Global Shelter Cluster, 2016)

Dampak dari peristiwa diatas yakni, selama musim semi dan musim panas tahun 2015 jumlah pengungsi dan imigran yang memasuki Perancis Utara tumbuh secara signifikan. Pada mulanya sejak imigran pertama kali menginjakkan kaki di Calais, pihak berwenang menginstruksikan untuk membangun *kamp* pengungsian pada bekas tanah tempat pembuangan asbes di zona industri untuk menampung orang-orang tersebut. Namun, karena jumlah yang tinggal sangat banyak, fasilitas yang ada ternyata sangat terbatas (Global Shelter Center, 2016). Pada awal tahun 2016, Pemerintah Perancis menginstruksikan untuk dilakukan pembongkaran pada tenda-tenda tersebut, dan mengatakan sekitar 8.000 orang yang tinggal disana akan ditawarkan untuk ditempatkan di pusat pengungsian di seluruh Perancis (VOA Indonesia, 2016). Selain itu terdapat wacana dari Presiden Hollande untuk mendirikan “pusat orientasi dan penerimaan” para pencari suaka agar dapat menyediakan penyambutan yang manusiawi dan bermartabat bagi orang-orang yang hendak mengajukan hak suaka (BBC News, 2016).

Tetapi pada faktanya, *kamp* pengungsi di Calais terlanjur dihancurkan terlebih dahulu dan wacana dari Presiden Hollande belum sepenuhnya dijalankan. Akibatnya, pengungsi yang sebelumnya tinggal di sana dipindahkan di pusat-pusat pengungsian di Perancis, namun karena jumlahnya yang sangat banyak dan setiap hari terus bertambah, para imigran mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di Perancis dengan mendirikan tenda-tenda di tempat yang tidak seharusnya, sehingga mengganggu ketertiban

umum. Pada 16 September 2016, sekitar pukul 6:00 pagi, antara 1.000 hingga 2.000 migran dan pencari suaka yang tinggal dan membangun *kamp* di jalan-jalan utara Paris ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke pusat perumahan khusus di Perancis. Tindakan tersebut merupakan evakuasi ke 28 sejak bulan Juni 2015 (Davis, 2016).

Pemerintah kota mengatakan bahwa siklus akan kembali berulang, ketika sudah dilakukan evakuasi, *kamp* migran akan terbentuk kembali. Di area dekat Stalingrad Metro, Quai de Jemmapes dan Avenue de Flandre menjadi lingkungan yang dibangun tenda, terdapat kasur dan dijadikan tempat penampungan sementara bagi mereka. Hal ini tentu dianggap sangat mengganggu ketertiban kota, menurut sumber dari kantor walikota Paris memperkirakan bahwa 60 hingga 70 migran baru tiba di Paris setiap harinya (Davis, 2016). Masalah-masalah seperti ini yang tentunya memicu munculnya faktor bagi masyarakat Perancis sehingga memiliki persepsi negatif pada imigran.

#### **4. Gejolak Teroris dan Islamophobia Global**

Tidak dapat dipungkiri bahwa serangkaian teror yang terjadi di Paris merupakan dampak dari terjadinya gejolak terorisme secara global. Bukan hanya di Perancis, pada kenyataannya serangkaian peristiwa juga terjadi di seluruh belahan dunia, yang berdampak pada meningkatnya islamophobia karena lagi-lagi *Islamic State* (IS) atau ISIS memproklamkan bertanggung jawab atas serangkaian serangan yang terjadi. Hanya kurang dari satu bulan, ISIS telah melancarkan empat aksi terorisme di empat negara, dengan jumlah korban mencapai 500 jiwa dari kalangan sipil. Setelah serangan dengan dua bom kembar pada 10 Oktober 2015 di Ankara Turki yang menewaskan 112 korban, pada 31 Oktober 2015 ISIS menanam bom

di pesawat metrojet Airbus A-321 Rusia hingga meledak di langis Gurun Sanai Mesir, yang menewaskan seluruh 224 penumpang turis Rusia. Kemudian pada 11 November, dua hari sebelum tragedi Paris, bom bunuh diri di Beirut Selatan, Lebanon, dikawasan hunian Syiah menewaskan 43 orang (Nainggolan, 2015).

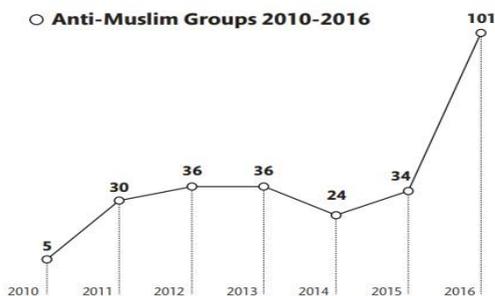
Selanjutnya, selain yang sudah disebutkan diatas, ISIS juga berada dibelakang beberapa peristiwa, antara lain serangan terhadap sebuah Masjid di Kuwait (27 tewas), penyerangan *resort* turis di Tunisia pada Juni 2015 (38 tewas), di Kota Kobani Kurdi Suriah (146 tewas), di Suruc Turki pada Juli 2015 (32 korban), di Provinsi Diyala dan Baghdad Irak pada Agustus 2015 (126 tewas), di Yaman pada September 2015 (puluhan orang tewas) (Colijn, Singleton, Ginkel, & dkk, 2015). Berbagai serangan ini tampaknya terkoordinasi serta menggambarkan perjuangan ISIS secara internasional untuk memperluas wilayah kekhalifahannya serta menciptakan ketakutan dan melemahkan masyarakat di luar wilayah yang jadi kendalinya langsung. Dalam berbagai video dan majalah, ISIS telah mengumumkan dan memperingatkan akan lebih banyaknya serangan terhadap negara-negara Barat.

Dampak dari meningkatnya gejala dunia internasional mengenai serangkaian peristiwa-peristiwa diatas yakni meningkatnya angka islamophobia pada dunia Barat, baik yang bersinggungan langsung dengan teror maupun tidak. Seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa, yang jelas turut mempengaruhi kondisi internal Perancis terlebih masyarakatnya sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi peningkatan islamophobia. Menurut *Southern Poverty Law Center* (SPLC), tahun 2015 hingga 2016 jumlah kelompok anti-Muslim di Amerika Serikat

meningkat 197 % dan kejahatan anti Muslim meningkat 67 % (The Carter Center, 2018).

Lembaga SPLC menemukan pertumbuhan yang meresahkan dalam kelompok-kelompok anti Muslim antara 2015 hingga 2016 dari 34 mencapai 101 (Figure 3). Selain itu pada tahun 2016, statistik kejahatan dan kebencian FBI menunjukkan bahwa kejahatan yang dimotivasi oleh bias anti-Muslim melonjak menjadi 307 insiden, naik dari 257 pada tahun sebelumnya, meningkat 19 % (The Carter Center, 2018). Kenaikan ini tentu menunjukkan bahwa gejala islamophobia telah menjadi *tren* secara global, bukan hanya dialami oleh satu negara tetapi menyebar dan mempengaruhi satu sama lain.

**Figure 4. 3 Kelompok Anti Muslim di AS tahun 2010-2016**

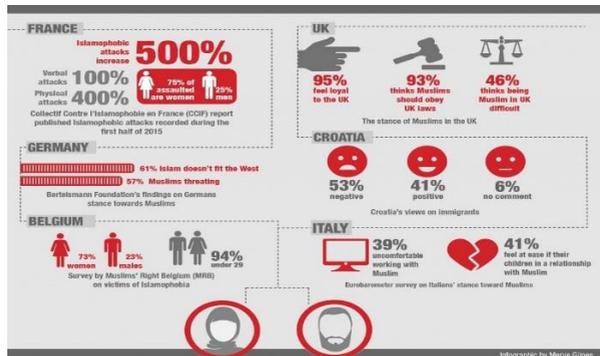


Sumber: (The Carter Center, 2018)

Selain di Amerika, fenomena islamophobia juga menjadi hal yang menjadi perhatian di Eropa. Fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor eksternal Perancis mengalami peningkatan angka islamophobia tahun 2015 hingga 2016. Di benua Eropa, negara-negara seperti Jerman, Belgia, Inggris, Croasia dan Italia juga mengalami hal serupa dengan Perancis.

Pada negara Jerman, *Bertelsmann Foundation's* mengungkapkan sebuah temuan mengenai pendapat orang Jerman kepada Muslim. Sebanyak 61 % menganggap Islam tidak cocok dengan Barat, dan 57 % beranggapan bahwa Muslim adalah mengancam. Selanjutnya pandangan orang-orang Croacia mengenai imigran. Dan hasilnya yakni 53 % menganggap negatif, 41 % menganggap positif dan hanya 6 % tidak mengungkapkan jawabannya. Negara yang lainnya dapat diwakilkan melalui gambar dibawah ini.

**Gambar 4.2 Peristiwa Berindikasi Islamophobia di Beberapa Negara Eropa tahun 2015**



Sumber: (Esteves, 2016)

#### D. Korelasi Antara Faktor Pemersepsi, Target dan Situasi Sehingga Menyebabkan Peningkatan Islamophobia tahun 2015-2016

Dari pemaparan diatas, penulis mengungkapkan tiga faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan fenomena islamophobia di Perancis pada Pemerintahan Presiden Francois Hollande tahun 2015 hingga 2016. Ketiga faktor diatas yakni pada pemersepsi atau masyarakat Perancis, pada target atau masyarakat Muslim dan pada situasi, baik internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut berjalan saling

mempengaruhi satu sama lain bagi terciptanya sebuah persepsi pada masyarakat Perancis. Terdapat penekanan pada analisis ini yakni bahwa faktor pada pemersepsi atau masyarakat Perancis adalah faktor yang menyangkut personal setiap inividu, dimana memang sentimen-sentimen kepada Muslim pada masyarakat Perancis sudah ada dan dibangun sejak lama melalui serangkaian peristiwa yang dialami pemersepsi secara langsung atau tidak, jadi bisa dikatakan bahwa faktor pada pemersepsi bukan merupakan suatu “hal yang baru” bagi peningkatan fenomena islamophobia tahun 2015-2016.

Faktor pada target (masyarakat muslim) dan faktor pada situasi berperan sebagai *trigger* atau pemicu masyarakat Perancis pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami peningkatan jumlah tindakan-tindakan berunsur islamophobia karena kedua faktor tersebut memang secara kebetulan benar-benar terjadi dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat Perancis, sehingga tidak heran bahwa sentimen yang sudah ada sejak lama, ketika dipantik dengan faktor yang lain akan mengakibatkan suatu fenomena tertentu. Secara garis besar memang ketiga faktor saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa persepsi yang dihasilkan oleh ketiga faktor diatas adalah persepsi negatif. Mengapa bisa begitu, jika dilihat pada pemersepsi atau subjek utama penelitian ini, masyarakat Perancis cenderung memiliki kepribadian yang unik dibandingkan negara-negara Eropa yang lain, yakni sangat mencintai “nilai-nilai” Eropa dan negaranya, bisa dibilang sangat nasionalis dan sangat bangga menjadi orang Perancis.

Sikap dan kepribadian ini tentu membuatnya sangat sulit untuk menerima hal-hal yang dianggap “baru” secara cuma-cuma masuk kedalam kehidupannya, apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai Republik Perancis yakni *laïcité*. (sekularisme) yang bersumber dari moto negara yaitu *liberté*, *égalité*, dan *fraternité*. Warga Perancis menganggap bahwa

semakin meningkatnya jumlah muslim di Perancis, semakin muncul perdebatan mengenai mampu tidaknya mereka berperilaku sesuai dengan sikap dan cara hidup orang Perancis. Banyak juga yang berpendapat bahwa Islam memang bertentangan dengan demokrasi, HAM, persamaan gender, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Pendapat itu muncul seiring dengan banyaknya keterbatasan atau aturan yang harus dipatuhi oleh Muslim dari sudut pandang masyarakat Perancis. Sebuah muslim yang ideal menurut masyarakat Perancis adalah yang mampu berbicara bahasa Perancis, tunduk pada aturan negara, dan menghormati *The Act 1905*.

Sejarah juga berperan, kolonialisasi yang menempatkan citra Barat sebagai bangsa yang superior daripada Timur, Timur sebagai bangsa yang barbar dan tidak rasional, termasuk juga islam. Ketika Islam semakin berkembang di Perancis, mereka merasa terancam. Konstitusi 1905 menegaskan mengenai penggunaan simbol-simbol keagamaan tidak dapat digunakan di area publik, namun dengan hadirnya Muslim akan membawa tantangan baru bagi Negara, karena Perancis menganut sekularisme tetapi dilain sisi Muslim diwajibkan untuk menggunakan *hijab* dalam syariatnya. *Hijab* dianggap sebagai simbol yang mewah bagi sebagian masyarakat Perancis tetapi dilain sisi Muslim menganggap bahwa *hijab* sebagai suatu hal yang biasa. Ditambah pengalaan masa lalu yang memicu munculnya citra kedekatan muslim dengan “teroris” yang telah dibangun oleh beberapa tokoh dan media turut memperburuk keadaan.

Masyarakat Perancis memiliki andil besar dalam menentukan persepsi apa yang akan muncul nantinya, tetapi beberapa karakteristik yang ada didalamnya sangat mendukungnya untuk menghasilkan sebuah persepsi negatif. Jika analisis di satukan dengan faktor pada target, akan sangat masuk akal bila masyarakat Perancis merasa nilai-nilai masyarakat Muslim sangat bertentangan dengan masyarakat lokal. Alasan yang pertama, masyarakat Muslim datang dengan

latar belakang ekonomi rendah, yakni menjadi pekerja kelas rendah yang memang pada kenyataannya memiliki kondisi yang sangat tidak “sepadan” dengan masyarakat Eropa yang terbiasa *gralor*. Kedua, rasa loyalitas mereka kepada negara asal dan agamanya (Islam) yang membuat mereka sangat sulit untuk membaur dan berintegrasi. Ketiga, pemerintah sudah berusaha untuk mengintegrasikan mereka melalui sebuah progam, tetapi memang sangat sulit untuk dianggap berhasil, karena banyak sekali hambatan yang ditemui.

Sulit bukan berarti tidak berusaha, dari sisi masyarakat Muslim menganggap bahwa mereka sudah mencoba untuk ikut andil dalam kehidupan sehari-hari dengan semaksimal mungkin mencoba untuk berinteraksi dengan masyarakat Perancis, namun pada kenyataannya sulit untuk berintegrasi diakibatkan oleh hambatan yang pada akhirnya sebelum berintegrasi sudah terdapat *gap* atau kesenjangan terlebih dahulu, seperti masalah pengangguran dan konsentrasi tempat tinggal yang kurang baik. Ditambah lagi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Perancis menganggap Muslim sebagai suatu hal “yang baru”. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Muslim dalam kehidupan sehari-hari menggunakan apa yang dikatakan sebagai “simbol keagamaan” adalah hal yang biasa. Masyarakat Perancis tidak mengenal halal dan haram, masyarakat Muslim terbiasa akan hal tersebut, dan masih banyak yang lain. Perbedaan sudut pandang menjadi sesuatu hal yang fundamental ketika dihadapkan.

Faktor pemersesi dan faktor target lebih berbicara mengenai kondisi masing-masing individual, munculnya persepsi akan disempurnakan dengan hadirnya faktor situasi, yang bisa disebut sebagai suatu kondisi, baik internal maupun eksternal yang sedang terjadi pada Negara yang bersangkutan atau diluar Negara. Penulis beranggapan bahwa faktor pada situasi merupakan faktor yang paling penting dalam proses terciptanya sebuah persepsi, karena secara langsung berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, bukan lagi antar individu. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 secara nyata memang

banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa besar di Perancis yang memiliki kototasi negatif, seperti bom besar, penyanderaan, krisis pengungsi, serta gejolak terorisme global yang sangat mempengaruhi masyarakat lokal dan membawa ketidaknyamanan untuk beraktifitas. Rasa marah, takut, sedih, dendam, semua saling beradu menjadi satu. Dan merupakan hal yang wajar jika masyarakat Perancis memiliki persepsi yang tambah negatif dengan Muslim akan peristiwa tersebut.

Jika disimpulkan dan ditarik garis lurus, ketiga faktor diatas saling berkaitan dan saling mempengaruhi bagi terciptanya persepsi di masyarakat. Masyarakat Perancis dengan nilai yang dimiliki dan keinginan untuk mempertahankannya sehingga menganggap Muslim adalah sesuatu yang “berbeda” dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sekularisme yang ada, masyarakat Muslim dengan kondisinya yang memiliki ruang gerak sangat terbatas, memiliki keinginan untuk berintegrasi tetapi hambatan selalu ada, dan situasi baik internal maupun eksternal yang memang sedang memanaskan pada tahun tersebut, secara sempurna berhasil menimbulkan persepsi negatif masyarakat Perancis bagi meningkatnya fenomena islamophobia tahun 2015 hingga 2016 pada Pemerintahan Presiden Francois Hollande.